

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, Oemar Seno, 1980, *Peradilan Bebas, Negara Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Ahmad, Zaenal Abidin, 1973, *Piagam Nabi Muhammad Saw Sebagai Konstitusi Negara Tertulis Pertama di Dunia*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Amal, Taufik Adnan dan Syamsu Rizal Panggabaian, 2004, *Politik Syari'at Islam*, Pustaka Alvabet, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly dan M.Ali Safa'at, 2006, *Teori Hans Kelsen*, Penerbit Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Azhary, 1995, *Negara Hukum Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Azhary, Tahir 2010, *Negara Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2008, *Tiga Dekade Prolegnas dan Peran BPHN*, BPHN, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi III*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fadjar, Mukhtie, 2005, *Tipe Negara Hukum*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Fuller, Lon L, 1964, *Morality of Law*, Yale University Press, New Haven and London.
- Gautama, Sudargo, 1973, *Pengertian Negara Hukum*, Alumni, Bandung.
- Hakim, Abdul Azis 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Hanim, Muslimah, 2007, *Eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UIR Press, Pekanbaru.

- Hamidullah, Muhammad, 1974, *Pengantar Studi Islam*, Bulan Bintang, Jakarta.
- Hardjon, 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- HR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Indra, Mexasai, 2011, *Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Iqbal, Muhammad, 2001, *Fiqh Siyarah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- Kusnardi, Moh. dan Harmaily Ibrahim, 1987, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN FH UI dan CV Sinar Bakti, Jakarta.
- Madjid, Nurcholis, 1992, *Islam Doktrin dan Peradaban*, Paramadina, Jakarta.
- Maleong, Lexy, 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung.
- Manan, Bagir, 1992, *Dasar-Dasar Perundang-undangan Indonesia*, Ind-Hill.Co, Jakarta.
- MD, Moh.Mahfud, 1999, *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Gama Media, Yogyakarta.
- Muhtaj, Majda El, 2005, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Kencana, Jakarta.

- Mulia, Musdah, 2001, *Negara Islam Pemikiran Politik Husain Haekal*, Paramedadina, Jakarta.
- Narbuko, Choloid dan Abu Achmadi, 2001, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara.
- Program Pascasarjana Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, 2014, *Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjan Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Universitas Islam Sultan Agung (Unissula)*, Semarang.
- Rahardjo, Satjipto, 1996, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Schmid, J.J. Von, 1998, *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Pembangunan, Jakarta.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1984, *Pengertian Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- _____, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Supranto, J., 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu perundang-undangan; Dasar-dasar dan Perkembangannya*, Kanisius, Yogyakarta.

- , 2002, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, cet.5, Kanisius, Jakarta.
- , 2010, *Ilmu Perundang-undangan: Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Thaib, Dahlan, Jazim Hamidi, dan Ni'matul Huda, 2003, *Teori dan Hukum Konstitusi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2007, *Eksistensi, Kedudukan, dan Wewenang Komisi Yudisial sebagai Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Widjaja, HAW, 1998, *Percontohan Otonomi Daerah di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Webster *new twentieth century dictionary unabridged second edition*, 1983,- Jean L. Mckechnie
- Yunas, Didi Nazmi, 1992, *Konsepsi Negara Hukum*, Angkasa Raya Padang, Padang.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom

Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2015 tentang Keikutsertaan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaannya;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Program Aksi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Jurnal

Isrok, 2009, *Korelasi antara Perda Bermasalah dengan Tingkat Investasi di Daerah*, Jurnal Hukum No.4, Volume 16, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Simamora, Janpatar, 2016, *Considering Centralization of Judicial Review Authority in Indonesia Constitutional System*, IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS) Vol. 21, Issue 2, Ver. V (Feb. 2016) PP 26-32.

Internet

<http://setkab.go.id/kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/>.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/06/16/16372801/kemendagri.tegaskan.pembatalan.3.143.perda.sesuai.aturan>.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/422-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-peraturan-perundang-undangan-lainnya.html>.

<http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/umum/322-upaya-menjadikan-kanwil-depkumham-sebagai-law-center-dalam-fasilitasi-pembentukan-perda.html>.

http://kumham-jakarta.info/download/cat_view/54-karya-ilmiah/61-birokrasi.

<http://www.djpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/1156-menakar-korelatifitasantara-harmonisasi-peraturan-daerah-dengan-hak-uji-materiilmahkamah-agung.html>.

<https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis-dalam-metode-penelitian>

<http://www.djpp.depkmham.go.id/htn-dan-puu/421-harmonisasi-peraturan-perundang-undangan.html>

<http://pkn-ips.blogspot.co.id/2014/10/konsep-pembagian-kekuasaan-negara-di.html>, diakses pada tanggal 25 November 2017.

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjf44WN_d7XAhWMwI8KHf67CbwQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fdigilib.unila

<http://zetzu.blogspot.co.id/2010/12/metode-pengumpulan-data.html>